

## FLYPAPPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH DAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Rika Wijayanti<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi Manajemen, Politeknik Negeri Malang

### ABSTRACT

**Purpose:** This research was intended to examine the probability of flypaper effect on the local government procurement in Trenggalek district as well as its financial performance. This presumption was measured using the analysis of autonomous ratio, effectivity ratio, consistency ratio, and the degree of fiscal decentralization. A descriptive quantitative approach was used to scrutinize the results. The data archived was a secondary data in the form of time series data of financial statements within the period of 2017 to 2021. Furthermore, the documentation technique was employed in data collection process. Meanwhile, the data analysis method utilized was proportion analysis, descriptive statistics: Cosstab, and financial ratio analysis. The results reveal that from 2017 to 2020 have the contribution percentage of PAD (locally-generated revenue) and DAU (general allocation funding) in Trenggalek district. Meanwhile, in 2021 the contribution percentage of PAD (locally-generated revenue) and DAU (general allocation funding) is below its minimum contribution percentage. The research denotes that there isn't a flypaper effect. The financial performance of Trenggalek district has not been optimal yet. Even though in managing PAD (locally-generated revenue), the government has performed effectively and efficiently, it has not shown its elevated autonomy. It is verified by the bigger amount of central government support than the PAD (locally-generated revenue) of Trenggalek district. Moreover, in allocating the budgeting as well as its financial, Trenggalek district has not performed balanced budgeting as the allocation for its operational expenditure is still higher than for its capital expenditure.

**Keywords:** Flypaper Effect, General Allocation Funding, Locally-Generated Revenue, Financial Performance, Autonomous Ratio, Effectivity Ratio, Consistency Ratio, The Degree Of Fiscal Decentralization

### ABSTRAK

**Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat adanya kemungkinan terjadinya flypaper effect terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten Trenggalek, serta mengetahui Kinerja Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio keserasian, dan derajat desentralisasi fiskal. Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data menggunakan data sekunder berupa data runtun waktu (*time series*) yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek periode tahun 2017-2021 yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis proporsi, statistik deskriptif - Cosstab dan analisis rasio keuangan.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 5 (lima) tahun 2017-2021 hanya memberikan kontribusi selama tahun 2017-2020 sedangkan tahun 2021 presentase kontribusi PAD dan Dau berada dibawah presentase kontribusi rata-rata. Penelitian ini tidak menemukan adanya Flypaper Effec pada pemerintah kabupaten Trenggalek. Analisis Kinerja keuangan Kabupaten Trenggalek dalam kategori masih belum optimal,

Article history:  
Received: 31 Mei 2023  
Revised: 12 Juni 2023  
Accepted: 30 Juli 2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.33366/ref.v10i2.4728>

E-mail corresponding author :  
rikawijayanti.aksa@gmail.com

PENERBIT:  
UNITRI PRESS  
Jl. Telagawarna, Tlogomas-  
Malang, 65144, Telp/Fax:  
0341-565500

meskipun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, akan tetapi tingkat kemandirian daerah masih rendah. Hal dibuktikan dengan lebih besarnya bantuan dana dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Trenggalek sendiri. Penggunaan dana juga masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal.

**Kata kunci:** *Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Epektifitas, Rasio Kekeragaman, Derajat Desentralisasi Fiskal Rasio Pertumbuhan*

## PENDAHULUAN

Peta politik terhadap penataan kewenangan dan kewajiban dalam pemerintahan di Indonesia telah berubah seiring dengan adanya kebijakan Otonomi daerah. Desentralisasi daerah atau lebih dikenal dengan otonomi daerah sendiri merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk dapat mengatur serta mengurus sendiri daerahnya yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah daerah serta masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah Indonesia tentang Desentralisasi wilayah dianggap sebagai kebijakan yang masih sangat demokrat dan sesuai dengan aspek dari penyerahan wewenang kepada daerah yang sebenarnya (Adiputra, 2014).

Efek secara langsung dari pelaksanaan otonomi daerah adalah cukup besarnya dana yang dibutuhkan dalam rangka menuju kemandirian sebagai modal awal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana utama pemerintah daerah yang dipakai untuk membiayai belanja sektor modal dan pembangunan. Sumber pembiayaan daerah tidak hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja, akan tetapi pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan yang lain. Pemerintah daerah mendapatkan dana perimbangan yang merupakan transfer dana dari pemerintah pusat untuk membantu kekurangan pendanaan yang dibutuhkan oleh daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan yang merupakan dana dari pemerintah pusat untuk membantu pendanaan pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan ini digabungkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendanaan dari daerah, yang selanjutnya dana tersebut oleh pemerintah daerah akan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dimana kebijakan penggunaannya sepenuhnya diserahkan kepada daerah yang masing-masing. Dengan harapan bahwa kabupaten/kota dapat menggunakan dana ini secara efektif dan efisien dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang disertai dengan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut (Ekawarna, 2017).

Dalam pelaksanaan desentralisasi, pemindahan dana dari pusat ke daerah tidak dapat dihindarkan mengingat desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang ke daerah yang menuntut daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Akibatnya pembiayaan yang dikeluarkan oleh daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah menjadi lebih besar dibanding sebelum desentralisasi. Pemindahan dana dari pusat diharapkan pemakaiannya dilakukan secara efektif serta efisien oleh daerah sehingga mampu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan mampu memenuhi serta menutup kekurangan dana daerah. Tentu saja kebijakan penggunaan dananya haruslah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Purbarini, dikatakan bahwa apabila tanpa campur tangan pusat kemampuan asli sebagian besar daerah di Indonesia saat ini yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu mengumpulkan tidak lebih dari 15% nilai APBD. Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan dari pendanaan memerlukan bantuan dari pemerintah pusat melalui transfer dana yang disebut dengan adanya perimbangan. Dana perimbangan sendiri terbagi menjadi Dana Bagi Hasil (DBH), DAU, dan DAK, dimana ketiganya akan saling melengkapi satu sama lain dalam pengalokasiannya. (Purbarini & Masdjojo, 2015).

Tujuan pemerintah pusat mentransfer dana kepada daerah agar kesenjangan dana yang dimiliki oleh daerah menjadi berkurang sehingga diharapkan terdapat standar minimum yang sama antara daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah kesejahteraan bagi seluruh wilayah di Indonesia. (Pramuka, 2010). Untuk menciptakan keseimbangan tersebut, daerah dengan kemampuan keuangan yang masih rendah akan mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai relatif besar, dan berlaku sebaliknya untuk daerah dengan kemampuan keuangan yang relative tinggi akan mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai yang lebih kecil. Dengan bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat harapannya adalah mampu mengurangi kesenjangan keuangan secara horizontal antar daerah, sehingga setiap daerah memiliki derajat kesiapan pendanaan yang relatif sama dalam pengimplementasian otonominya (Amalia, 2017).

Pemberian transfer dana dari pemerintah pusat memberikan satu permasalahan tersendiri, dimana pemerintah daerah lebih menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai kegiatan daerah yaitu untuk belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan penggunaan PAD dengan cara memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Sehingga dalam praktiknya, stimulus dana dari Pemerintah Pusat ini dijadikan sebagai dana utama dalam pembiayaan di pemerintah daerah. Dengan kata lain transfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang seharusnya dijadikan sebagai stimulus untuk meningkatkan kemandirian daerah, direspon berbeda oleh daerah. Daerah menjadi lebih tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemandirian daerah semakin berkurang (Pramuka, 2010). Kondisi pemerintah daerah lebih menggantungkan pembiayaan belanja daerah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut dengan *Flypaper Effect* (Aragón, 2009). Maimunah (2006) menyatakan bahwa *Flypaper Effect* merupakan keadaan yang terjadi pada saat daerah lebih banyak menggunakan dana bantuan (transfer) dari pusat untuk kegiatan belanja daerah daripada memakai dana dari kemampuan daerah sendiri yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah.

Hartati (2009) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan *Flypaper Effect* antara daerah dengan tingkat PAD tinggi dan daerah dengan tingkat PAD rendah. Daerah dengan PAD rendah lebih berpotensi terhadap terjadinya *Flypaper Effect*. Kabupaten Trenggalek sendiri merupakan salah satu wilayah bagian barat di propinsi Jawa Timur yang jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Trenggalek masih sangat tertinggal jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga, seperti Blitar, Tulungagung, Kediri dan beberapa daerah lain di Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat melalui besaran pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek masih sangat rendah jika dibanding dengan daerah-daerah disekitarnya. Sebagai gambaran Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021

sebesar Rp 1.859.926.435.396,71 terbilang paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten Tulungagung, Kediri, dan Kabupaten Blitar yang masing-masing sebesar Rp 2.161.047.703.288,09; Rp2.923.110.843.869,24; dan Rp2.467.651.406.772,43. Kondisi rendahnya Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek dibanding Kabupaten tetangga tidak hanya terjadi pada tahun 2021 saja tetapi juga tahun-tahun sebelumnya.

Tingkat PAD Kabupaten Trenggalek yang masih rendah, mengakibatkan kabupaten Trenggalek masih mengandalkan transfer dari pusat untuk menutup kekurangan belanja daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat dimaksimalkan sebagai salah satu dari sumber pendanaan oleh daerah. Bantuan dana dari pusat memberikan celah untuk daerah dalam menutup kekurangan pembiayaan, sehingga bantuan dana pusat ini sangat diharapkan untuk bisa menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan otonomi. Untuk mewujudkan tujuan dari otonomi seperti yang diharapkan oleh pemerintah pusat, kabupaten Trenggalek harus terus berupaya dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi daerahnya serta diharapkan mampu meningkatkan kemandirian daerah. Perubahan sektor perekonomian yang disebabkan oleh kondisi pandemi covid 19 yang pernah terjadi di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab fluktuatifnya nilai pendapatan daerah dan belanja pemerintah daerah. Itulah mengapa *Flypaper effect* pada Belanja Daerah di Kabupaten Trenggalek ini menjadi menarik untuk dianalisis.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan *FlyPaper effect* ini. (Pramuka, 2010) menemukan hasil jika *FlyPaper effect* tidak terjadi di kabupaten dan kota di Jawa, tetapi PAD dan DAU memiliki kecenderungan akan meningkatkan jumlah dari belanja daerah. Ditemukan pula hasil bahwa pengaruh signifikan dari PAD dan DAU meningkatkan Belanja modal dan operasinal di tahun berikutnya. Sedangkan (Oktavia, 2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat *flypaper effect*, kondisi ini ditunjukkan dengan adanya pengaruh dari DAU yang lebih signifikan terhadap belanja daerah jika dibandingkan dengan pengaruh PAD terhadap belanja daerah.

Peneliti tertarik untuk lebih memfokuskan pada kabupaten Trenggalek dikarenakan Kabupaten Trenggalek memiliki karakteristik pertumbuhan ekonomi yang relatif tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain di Propinsi Jawa Timur . Dibuktikan dengan masih rendahnya pendapatan Kabupaten Trenggalek jika dibandingkan dengan kabupaten lain. Selain itu terjadinya fluktuasi penerimaan dan belanja di daerah Kabupaten trenggalek yang disebabkan oleh pandemi covid 19 juga menjadi salah satu yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mencoba melakukan analisis pengaruh *flypaper effect* pada Belanja Daerah serta kinerja keuangan dengan menggunakan data runtun waktu (time series) (2017-2021), sehingga diharapkan dapat memberikan hasil analisis yang lebih komprehensif. Berdasarkan uraian tersebut, judul penelitian ini adalah ”*Flypapper Effect* Pada Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data menggunakan data kuantitatif yang berupa data angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Dengan objek yang dipakai berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan serta

Belanja Daerah. Data yang diambil yaitu: (1) realisasi Belanja Daerah (BD); (2) realisasi Dana Alokasi Umum (DAU); dan (3) realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek. Dimana periode waktu yang digunakan adalah periode 2017 sampai 2021.

Pemilihan Kabupaten Trenggalek sebagai objek dalam penelitian ini didasarkan pada:

1. Nilai PAD Kabupaten Trenggalek selama periode 5 tahun (2017-2021) terbilang paling rendah jika dibandingkan daerah tetangga (Tulungagung, Blitar, Kediri) yang merupakan wilayah barat Propinsi Jawa Timur dengan karakteristik alam yang hampir sama;
2. Nilai PAD kabupaten Trenggalek mengalami perubahan fluktuatif selama periode 2017-2021
3. Belum ada penelitian terdahulu yang mengkhususkan penelitian terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik dokumentasi.

### Teknik Analisis Data

#### a. Teknik Analisis Proporsi

Teknik analisis proporsi yang digunakan adalah analisis terhadap kontribusi DAU dan PAD pada Belanja Daerah (BD). Menggunakan analisis Proporsi, dengan formulasi:

$$p \text{ (kontribusi)} = \frac{X_i}{X} \times 100\%$$

(Sumber: Adiputra, 2014)

Dimana :

$X_i$ : DAU dan PAD

$X$ : Belanja Daerah

#### b. Statistik Deskriptif

Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah, digunakan Analisis Crosstab (tabulasi silang). Dengan ketentuan jika Asymp. Sig (2-sided) Linear-by-Linear Association  $> \alpha$  (0.05), maka tidak terjadi flypaper effect dan jika Asymp. Sig (2-sided) Linear-by-Linear Association  $< \alpha$  (0.05), maka terjadi flypaper effect.

#### c. Analisis Rasio Keuangan

Untuk mengukur kinerja keuangan analisis rasio keuangan yang dipakai adalah sebagai berikut:

##### (1) Rasio Kemandirian daerah

Halim (2007:232) menyatakan bahwa kemandirian ekonomi daerah dinyatakan dengan tingkat pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain, seperti bantuan pemerintah (transfer pusat) atau pinjaman. Rasio kemandirian dapat dijadikan sebagai tolak ukur tingkat kemandirian suatu wilayah. Dengan nilai derajat kemandirian yang tinggi, maka dikatakan tingkat ketergantungan terhadap bantuan dari pihak luar akan semakin rendah, dalam hal ini ketergantungan terhadap bantuan dana dari pusat dan provinsi.

$$\text{Rasio Kemandirian daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan pusat + Pinjaman}}$$

(2) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}}$$

Derajat Efektivitas PAD merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari daerah untuk mewujudkan perencanaan pemakaian Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan yang didasarkan pada potensi dari daerah. (Pramono, 2014). Pemerintah daerah dipadang memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsinya apabila tingkat efisiensi yang diperoleh minimal 100% atau 1. Nilai efektifitas yang semakin tinggi maka dapat diartikan tingkat kinerja daerah semakin baik.

(3) Rasio keserasian

Merupakan suatu kondisi dimana pemerintah daerah lebih optimalkan penggunaan dari dananya pada belanja rutin dari pada untuk membiayai belanja modal. Semakin tinggi nilai presentase yang penggunaan dana untuk belanja rutin berakibat pada cenderung semakin kecilnya nilai presentasi belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Rasio keserasian dibagi menjadi rasio belanja rutin terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja.

a. Rasio belanja rutin/operasi =  $\frac{\text{Belanja Rutin / Operasi}}{\text{Total APBD}}$

b. Rasio Modal =  $\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total APBD}}$

(4) Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan rasio yang dipakai untuk mengukur persentase kemampuan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (Bisma, 2010).

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Metode berisi langkah dalam penyelesaian rangkaian penelitian termasuk didalamnya langkah

**PEMBAHASAN**

**Analisis Proporsi**

Nilai dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah kabupaten Trenggalek dihitung dengan analisis proporsi. Analisis proporsi ini di formulasikan dengan X1 (DAU dan PAD), X2 (Belanja Daerah) dikalikan 100%. Hasil dari analisi proporsi adalah sebagai berikut:

**Table 1. Kontribusi PAD dan DAU terhadap belanja Daerah Kabupaten Trenggalek periode 2017-2021**

| Thn  | PAD dan DAU (RP)     | Belanja daerah (RP)  | Kont ribusi |
|------|----------------------|----------------------|-------------|
| 2017 | 1.139.770.289.674,12 | 1.524.951.895.224,41 | 75%         |
| 2018 | 1.119.354.229.639,21 | 1.501.734.544.651,87 | 75%         |

|      |                      |                      |     |
|------|----------------------|----------------------|-----|
| 2019 | 1.201.461.681.594,78 | 1.756.534.679.311,55 | 68% |
| 2020 | 1.201.461.681.594,78 | 1.591.413.234.370,28 | 68% |
| 2021 | 1.057.009.588.076,57 | 1.840.127.791.074,27 | 57% |
|      |                      | Rata-Rata            | 68% |

**Table 2. Hasil Analisis CrosstabPAD terhadap belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Periode 2017-2021**

| Chi-Square Tests             |                     |    |                       |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------|
|                              | Value               | df | Asymp. Sig. (2-sided) |
| Pearson Chi-Square           | 20,000 <sup>a</sup> | 16 | ,220                  |
| Likelihood Ratio             | 16,094              | 16 | ,446                  |
| Linear-by-Linear Association | ,112                | 1  | ,738                  |
| N of Valid Cases             | 5                   |    |                       |

a. 25 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek selama periode 2017-2021 menunjukkan Value Linear-by-Linear Association 0,280 dengan nilai Asymp. Sig(2-sided) 0,597 >  $\alpha(0,05)$ . Dengan nilai Asymp. Sig(2-sided) <  $\alpha(0,05)$  dapat dikatakan tidak terjadi *flypapper effect*.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah dalam penelitian ini diuji menggunakan Analisis Statistik Deskriptif – Crosstab. Berdasarkan tabel 2 dan tabel 3 diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) (0.738) berpengaruh lebih besar dari Dana Alokasi Umum (DAU) (0.597). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maimunah (2006) ditemukan bahwa telah terjadi *Flypaper Effect* di Pulau Sumatera dimana teknik analisis yang dipakai adalah regresi sederhana dan regresi berganda, sedangkan Pramuka (2010) dalam penelitiannya tidak menemukan adanya *Flypaper effect*, penelitian ini Kabupaten/Kota di Jawa dengan teknik analisis uji asumsi klasik, regresi sederhana dan berganda, akan tetapi PAD dan DAU cenderung meningkatkan jumlah belanja daerah pada tahun berikutnya.

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Trenggalek selama periode 2017-2021 dengan menggunakan statistik deskriptif-crosstab diperoleh hasil Pengaruh PAD terhadap belanja daerah lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh DAU terhadap belanja daerah. Maka sesuai dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terjadi kondisi *Flypaper effect* pada daerah Kabupaten Trenggalek.

Kondisi *Flypaper effect* akan terjadi apabila respon penggunaan dana oleh daerah akan lebih besar menggunakan DAU dari pada PAD yang dimiliki oleh daerah tersebut. Hasil yang didapat pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengalokasian penggunaan danadi Kabupaten Trenggalek telah sesuai dengan tujuan dari pengalokasian DAU oleh pemerintah pusat, yaitu untuk stimulus bagi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli dari daerahnya sendiri dengan lebih mengoptimalkan potensi dan sumber kekayaan yang ada di

daerah. Lebih lanjut akan dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat. Untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek masih memerlukan stimulus untuk mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Trenggalek, sehingga nilai PAD dapat terus meningkat setiap tahunnya.

### Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

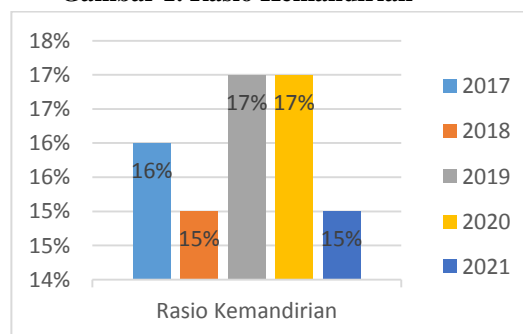
Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Trenggalek untuk periode tahun 2017-2021 diukur dengan menggunakan analisis rasio:

#### 1. Rasio kemandirian

Rasio Kemandirian Daerah adalah kemampuan daerah untuk secara mandiri membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi derajat kemandirian daerah, semakin berkurang ketergantungan daerah tersebut terhadap bantuan pihak ketiga (khususnya pemerintah pusat dan provinsi) berlaku juga untuk keadaan sebaliknya. Pola hubungan tingkat kemampuan daerah berdasarkan rasio kemandirian dibagi menjadi empat, yaitu: (1) Pola Hubungan Instruktif, merupakan pola dengan tingkat kemampuan keuangan rendah sekali dengan nilai presentase kemandirian 0% - 25%; (2) Pola hubungan Kosultatif, merupakan pola dengan tingkat kemampuan keuangan rendah dengan nilai presentase kemandirian 25% - 50%;(3) Pola hubungan Partisipatif, merupakan pola dengan tingkat kemampuan keuangan sedang dengan nilai presentase kemandirian 50% - 75%; dan (4) Pola hubungan Delegatif, merupakan pola dengan tingkat kemampuan keuangan tinggi dengan nilai presentase kemandirian 75% - 100%

Hasil Rasio kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek Periode Tahun 2017-2021 ditunjukkan pada gambar berikut:

**Gambar 1. Rasio Kemandirian**



Berdasarkan gambar di atas menunjukkan nilai rasio kemandirian Kabupaten Trenggalek selama periode 5 tahun memiliki rata-rata sebesar 16%. Rasio ini berada dalam kategori kemampuan keuangan kurang. Untuk pola hubungan masuk pada kategori hubungan instruktif dimana peran dari pemerintah pusat masih sangat dominan jika dibandingkan dengan daerah sendiri. Keadaan ini terlihat dari nilai rasio yang diperoleh yaitu masih pada rentang 0% sampai 25%. Nilai rasio yang masih rendah menunjukkan ketergantungan kabupaten Trenggalek terhadap bantuan dari pusat masih relative tinggi, sehingga sumber dana ekstern masih menjadi salah satu dana utama dalam pembiayaan di daerah.

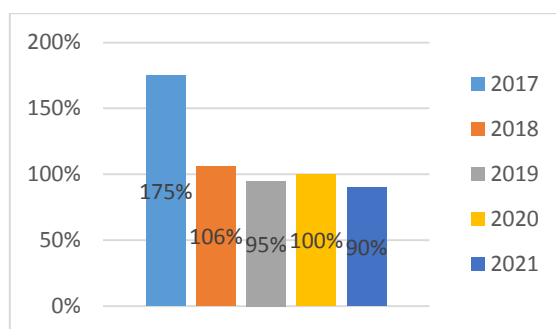


## 2. Rasio Efektifitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Kriteria untuk rasio efektifitas: (1) Tidak efektif apabila rasio kurang dari 100%; (2) Efektif berimbang jika rasio sama dengan 100%; dan (3) Efektif jika rasio lebih dari 100%.

Hasil Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek Periode Tahun 2017-2021 ditunjukkan sebagai berikut:

**Gambar 2. Rasio Efektifitas**



Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Trenggalek sesuai dengan hasil masih belum Efektif karena nilai dari efektifitas masih kurang dari 100% pada periode 2019 dan periode 2021. Untuk Efektifitas pada periode 2020 merupakan efektifitas berimbang dengan nilai sama dengan 100% sedangkan pada periode 2017 memiliki kategori Efektif dimana nilainya diatas 100%.

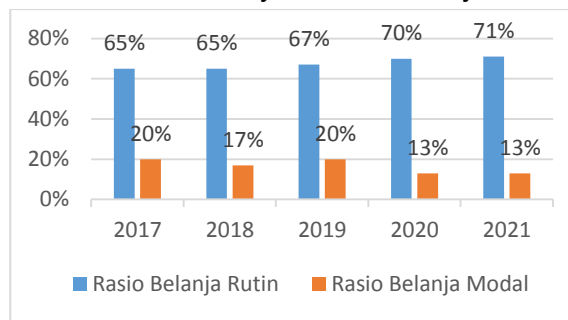
Menurut uraian hasil di atas, Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Trenggalek mengalami perubahan penurunan efektifitas, salah satu penyebabnya adalah pandemi yang terjadi yang mengakibatkan tidak stabilnya perekonomian. Akan tetapi apabila dilihat dari rata-rata selama periode 2017-2021 memiliki tingkat efektifitas Sangat Efektif karena rata-rata efektifitasnya 113,6% yang didapat dari penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya.

## 3. Rasio Keserasian

Rasio ini menunjukkan bagaimana daerah memberikan prioritas optimal terhadap pengalokasian dananya, yaitu untuk pembiayaan belanja rutin dan pembiayaan belanja modal. Semakin besar nilai prosentase dari alokasi dana untuk belanja rutin memberikan akibat pada semakin kecilnya alokasi investasi dana yang digunakan untuk pembiayaan modal yaitu untuk penyediaan sarana dan prasarana ekonomi. (Halim, 2012)..

Rasio keserasian pemerintah kabupaten Trenggalek tampak seperti berikut :

**Gambar 3. Rasio Belanja Rutin dan Belanja Modal**



Rasio Belanja rutin Kabupaten trenggalek terus mengalami kenaikan tiap tahun dari 65% sampai 71%. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa rasio belanja operasional Kabupaten Trenggalek dapat dikatakan dalam kategori baik karena berada pada kisaran 50%-100%. Sedangkan untuk belanja modal Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan, sehingga dapat dikatakan bahwa rasio belanja modal pemerintah Kabupaten Trenggalek masuk dalam kisaran 0%-50% atau kategori tidak baik.

Rasio belanja operasional pemerintah Kabupaten Trenggalek lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasio belanja modal. Dapat disimpulkan bahwa alokasi utama pendanaan di kabupaten Trenggalek digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja operasionalnya, dan berakibat pada rendahnya pembiayaan untuk belanja modal. Kondisi ini terlihat dari nilai rata-rata belanja modal yang lebih kecil dari nilai rata-rata belanja operasionalnya. Pengeluaran terbesar pada belanja operasional yaitu untuk membiayai belanja dinas otonom dan belanja pegawai untuk gaji pegawai negeri sipil. Belum adanya aturan dan patokan yang jelas mengenai besaran pengalokasian belanja modal mengakibatkan Kabupaten Trenggalek lebih memfokuskan pada pemenuhan belanja untuk pengeluaran rutinnya dibandingkan untuk belanja pembangunan daerah.

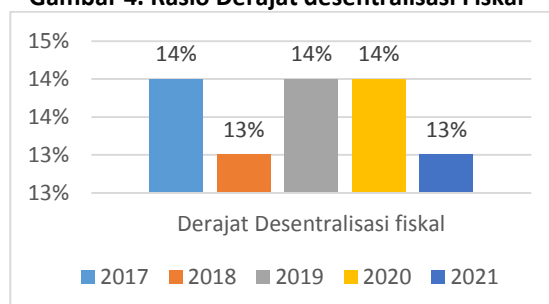
#### 4. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur persentase kemampuan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Rasio Desentralisasi Fiskal didasarkan pada perbandingan dari nilai Pendapatan Asli daerah dengan total dari nilai penerimaan yang dimiliki oleh daerah.

Kriteria tingkat desentralisasi fiskal dibagi menjadi 6 yaitu: (1) 0 – 10 kriteria sangat kurang; (2) 10 – 20 kriteria kurang; (3) 20 – 30 kriteria sedang; (4) 30 – 40 kriteria cukup; (5) 40 – 50 kriteria baik; dan (6) >50 kriteria sangat baik.

Rasio Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Trenggalek Periode Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

**Gambar 4. Rasio Derajat desentralisasi Fiskal**



Berdasarkan data diatas dapat menunjukkan bahwa tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan pada tahun 2017 sampai 2021 pada rentang kategori kurang dapat dilihat dari hasil derajat desentralisasi fiskal menunjukkan pada rentang antara 10%-20%. Dengan kata lain pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Trenggalek masih tergantung dengan pusat.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis data serta pembahasan adalah bahwa kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Trenggalek selama periode tahun 2017-2020, sedangkan untuk tahun 2021 nilai kontribusi dibawah rata-rata. *Flypaper effect* tidak terjadi pada belanja daerah selama periode 2017-2021. Hal ini dapat diartikan bahwa Kabupaten Trenggalek tetap mengoptimalkan penggunaan dana dari PAD jika dibandingkan dengan penggunaan dana dari DAU meskipun nilai PAD Kabupaten Trenggalek masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan daerah yang lain.

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada periode 2017-2021 yang terdiri dari: (1) Kemandirian tergolong Rendah dimana Pola hubunganyang dimiliki adalah Instruktif, yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Trenggalek masih membutuhkan dana dari pusat untuk membiayai pembangunan dan pemerintahan; (2) Rasio Efektifitas merealisasikan PAD memiliki nilai rata-rata sangat efektif, yang artinya Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah mampu merealisasikan penggunaan PAD sesuai dengan anggaran; (3) Pemerintah Kabupaten Trenggalek Lebih Condong pada pengeluaran Rutin dari pada Pengeluaran pembangunan; (4) Pembangunan masih tergantung pada pemerintah pusat.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat di daerah Trenggalek, sebaiknya perencanaan terhadap penyusunan anggaran dan penggunaan dilakukan dengan lebih tepat sasaran pada periode yang akan datang. Upaya untuk lebih mengoptimalkan pendapatan dari sumber-sumber penerimaan asli daerah harus terus ditingkatkan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Selanjutnya penggunaan terhadap dana yang didapat dari pusat maupun pendapatan asli daerah harus tepat sasaran sehingga kesejahteraan masyarakat akan tetap terjamin.

Mengingat tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, untuk dapat mengurangi ketergantungan terhadap pusat, maka pemerintah daerah harus mengupayakan memaksimalkan potensi daerah yang berdampak pada meningkatnya PAD seperti mendorong pengembangan pariwisata, kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), agro-industri, bidang jasa dan bidang ekonomi lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Selain itu, pemerintah kabupaten Trenggalek juga dirasa perlu untuk lebih meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Aragón, F. M. (2009). *The Flypaper Effect and Costly Tax Collection*. *London School of Economics, March*.

**Jurnal dan lainnya**

- Adiputra, I. M. P. (2014). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika (JINAH)*, 3(2), 1232–1261.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/4051>
- Amalia, F. (2017). Flypaper Effect of Regional Expenditure and It's Impact to Regional Inequality in Indonesia. *SIGNIFIKAN: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(1), 125–138.  
<https://doi.org/10.15408/sjie.v6i1.3293>
- Bailey, S. J., & Connolly, S. (1998). The flypaper effect: Identifying areas for further research. *Public Choice*, 95, 335–361.  
<https://doi.org/10.1023/A:1005053921709>
- Baskaran, T. (2013). *The flypaper effect: evidence from a natural experiment in Hesse*. 47061.  
<https://mpira.ub.uni-muenchen.de/37144/>
- Bisma, I Dewa Gde & Susanto, Hery. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus, 4(3),75-86 .  
<http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/12.-I-Dewa-Gde-Bisma.pdf>
- Dewi, Santi Rahma. *Flypaper Effect, PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Journal Of Accounting Science, 1(4), 154-177.  
<https://jas.umsida.ac.id/index.php/jas/article/view/1558>
- Ekawarna, S. U. (2017). Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah ( Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten / kota di Provinsi Jambi ). *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(3), 167–184.  
<https://mail.online-journal.unja.ac.id/JES/article/view/3639>
- Hartati. 2009 ”*Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah*”. Tesis pada Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Hines, J. R., & Thaler, R. H. (1995). Anomalies: The Flypaper Effect. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 217–226.  
<https://doi.org/10.1257/jep.9.4.217>
- Lampung, D. P. (2015). *Imam Santoso, I Wayan Suparta, Saimul Flypaper Effect Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Di Provinsi Lampung*. 4, 135–166.  
<http://digilib.unila.ac.id/8685/>
- Maimunah, Mutiara dan Akbar, Rusdi. 2008. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatera*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 11(1), hal. 37-51.  
[https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\\_pencarian/31655](https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/31655)
- Mutiary, L. (2017). *Flypaper Effect : An Empirical Study Of Indonesia Case ( 2004 – 2010 )*.
- Oktavia, D. (2014). Flypaper Effect: Fenomena Serial Waktu Dan Lintas Kabupaten Kota Di Jawa Timur 2003-2013. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 12(2), 1–16.  
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1407>
- Pramuka, B. A. (2010). Flypaper Effect pada Pengeluaran Pemerintah Daerah di Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11, 1–12.  
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/1283>

- Purbarini, E., & Masdjojo, G. N. (2015). Flypaper Effect on Operating Expenditure and Capital Expenditure of the City Government in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(1), 75–84.  
<http://journals.ums.ac.id>
- Yuliantoro, Heri R. 2013. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota XYZ Tahun Anggaran 2xx6*. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 6(2), 36-45.  
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/44888>
- Zuhri, Muhammad dan Ahmad Sholeh. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek*. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu*, 10(1), 339-354.  
<https://journal.feb-uniss.ac.id/home/article/view/282>
- Sour, L. (2013). The Flypaper Effect in Mexican Local Governments \*. *Estudios Económicos*, 28(1), 165–186.  
<https://www.jstor.org/stable/23609654>

### **Dokumen Resmi Lainnya**

- \_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Pendapatan Pemerintah Daerah.